**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pajak Reklame selama ini telah diatur pada Bab V Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan
- b. bahwa dengan berkembangnya situasi dan kondisi Kota Medan serta dinamisasi perekonomian masyarakat, khususnya perusahaan-perusahaan, Periklanan, Reklame dipandang perlu mengatur kembali tentang Pajak Reklame
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246).
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 42 Tambahan Lembaran Negara No. 3685), Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

- Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
3. Walikota adalah Walikota Kota Medan
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

5. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
8. Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik
9. Reklame kain adalah yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
10. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
12. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan ngan cara dibawa oleh orang.
13. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
15. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
16. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara
17. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
18. Nilai strategis titik reklame adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame
19. Kelas jalan adalah suatu klasifikasi atas setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang didasarkan kepada mutu dan lebar jalan
20. Rumah ibadah adalah : Masjid, Gereja, Vihara, Kuil dan Pura
21. Gedung bersejarah adalah gedung-gedung peninggalan sejarah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Melakat (Stiker)
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - f. Reklame udara
 - g. Reklame suara
 - h. Reklame film/slide
 - i. Reklame peragaan
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warna harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya
 - b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - c. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan
 - d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan / atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $0,25 \text{ m}^2$ dan diselenggarakan di atas tanah tersebut
 - e. Merupakan reklame yang disebarakan, apabila benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya.
 - f. Diselenggarakan oleh Perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud
 - g. Diselenggarakan oleh Partai Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame
- (2) Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

BAB III DASAR PENGENAAN, NILAI SEWAA, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan :
 - a. Lokasi Penempatan

- b. Jenis
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan dan
 - d. Ukuran media reklame
- (3) Lokasi penempatan reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah lokasi peletakkan reklame berdasarkan nilai strategis titik reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kelas I
 - b. Kelas II
 - c. Kelas III
- (5) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (6) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9
- (7) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah ukuran luas/m² media reklame yang terpasang

Pasal 6

Penempatan reklame pada lokasi yang mempunyai nilai strategis titik reklame dan pada kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung berdasarkan satuan rupiah.

Pasal 7

- (1) Besaran nilai rupiah pada lokasi strategis titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dirinci sebagai berikut :

a. .

Nilai Strategis	Ukuran Reklame	Besaran Nilai Strategis (Rp)
Kelas I	s/d 2 x 4 m	30.000.000
Kelas II	s/d 2 x 4 m	25.000.000
Kelas III	s/d 2 x 4 m	20.000.000

b. .

Nilai Strategis	Ukuran Reklame	Besaran Nilai Strategis (Rp)
Kelas I	Diatas 2 x 4 m	175.000.000
Kelas II	Diatas 2 x 4 m	150.000.000
Kelas III	Diatas 2 x 4 m	125.000.000

- (2) Besaran Nilai Rupiah pada Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dirinci sebagai berikut :

- a. Untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/large electronic display (LED) dan sejenisnya ditetapkan :

Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Reklame (m ²)	Jangka Waktu Pemasangan	Besaran Nilai Sewa (Rp.)
Papan/Billboard/ Vedotron/LED	Kelas 1.1	1 m ²	1 hari	9.000
	Kelas 1.2	1 m ²	1 hari	8.500
	Kelas 1.3	1 m ²	1 hari	8.000
	Kelas II.1	1 m ²	1 hari	7.500
	Kelas II.2	1 m ²	1 hari	7.000